

Abstract

The Hashtag #TolakOmnibusLaw on Twitter is a form of community participation in the deliberation process for decision making. This participation takes place through social media which creates new public places for public advocacy to occur. The issues being carried out by the hashtag #TolakOmnibusLaw is a form of rejection from the public against government policies related to the Omnibus Law and *RUU Cipta Kerja*. There are several types of message that are being conveyed through interaction by tweets on Twitter regarding #TolakOmnibuslaw. This interaction of social relations on actors is understood as a network of actors on the concept of the social network. By using Social Network Analysis (SNA), Content Analysis, Natural Language Process (NLP), The writer can see that there is a form of rejection of the type of message that is dominated by the government's criticism with a lot of negative sentiment, where, after knowing these two things, the researcher focuses on expressing the actors involved in policy advocacy. Therefore, this research can describe and reflect some of the conditions and attitudes of the public regarding Omnibus Law *RUU Cipta Kerja*. Then, it can be used as a source of data that is desired and needed by the community. In the perspective of public policy, data and research results can be used as analytical tools related to government decision making

Keywords: Policy Advocacy, Social Network Analysis (SNA), Types of Message, Sentiment, Actor, Omnibus Law

ABSTRAK

Hashtag #TolakOmnibusLaw di twitter merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah pengambilan keputusan. Partisipasi ini berlangsung melalui media sosial yang menciptakan tempat-tempat publik baru untuk terjadinya advokasi publik. Isu yang dibahas oleh tagar #TolakOmnibusLaw ini merupakan bentuk penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja. Ada beberapa jenis pesan yang disampaikan melalui interaksi melalui tweet di Twitter terkait #TolakOmnibuslaw, yang dimana mayoritas merupakan Interaksi relasi sosial pada aktor dipahami sebagai jejaring aktor dalam konsep jejaring sosial. Dengan menggunakan Social Network Analysis (SNA), Content Analysis, Natural Language Process (NLP), Penulis dapat melihat bahwa terdapat bentuk penolakan terhadap jenis pesan yang didominasi oleh kritik pemerintah dengan banyak sentimen negatif, dimana setelah mengetahui kedua hal tersebut peneliti fokus pada pengungkapan aktor-aktor yang terlibat dalam advokasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendeskripsikan dan merefleksikan beberapa kondisi dan sikap masyarakat terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kemudian dapat dijadikan sebagai sumber data yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, data dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai alat analisis terkait pengambilan keputusan pemerintah.